
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PAI DALAM KURIKULUM MERDEKA DI SMP MUHAMMADIYAH 47 SUNGGAL

Siti Maharani Pohan

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : sitimaharanipohan@gmail.com

Abstrak

Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan kebebasan Kepada sekolah untuk mengeksplorasi kemampuannya sesuai dengan sarana.input Serta memberikan kemerdekaan pada guru untuk menyampaikan materi yang essensial dan urgen. Dan yang paling penting lagi adalah memberikan ruang yang yang luas dan bebas agi peserta didik untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar memperoleh hasil pendidikan yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara efektif dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PAI. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengamatan langsung serta informasi actual dari berbagai jurnal ilmiah. Hasil penelitian, bahwa implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI berjalan dengan baik sebab alur kurikulum merdeka sangat cocok dengan karakter PAI yang harus disampaikan bertahap mulai dari hal yang paling penting yaitu mulai dari Aqidah, Al qur'an hadist, fikih, Akhlak, serta Tarikh

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, Pendidikan Agama Islam, Merdeka Belajar

Abstract

An independent curriculum is a curriculum that gives schools the freedom to explore their abilities according to the facilities, inputs and resources they have, and gives teachers the freedom to deliver essential and urgent material. And the most important thing is to provide a wide and free space for students to further maximize their potential in order to obtain maximum educational results. This study aims to find out how to effectively implement the Independent Curriculum on PAI subjects. The methodology used in this research is descriptive qualitative with direct observation and actual information from various scientific journals. The results of the study, that the implementation of the independent curriculum in PAI subjects went well because the independent curriculum flow was very compatible with the character of PAI which had to be

Keywords: :independent curriculum, Islamic religious education, independt learning

PENDAHULUAN

Implementasi Kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik berkembang intelektual, emosional, serta fisiknya.

Kurikulum yang baik tidak akan mencapai hasil yang maksimal, jika pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang baik bagi anak didik. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum yang meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan penyuluhan dan pengaturan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaiannya kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran.

Sebelum menetapkan strategi perlu terlebih dahulu untuk merumuskan tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan merupakan roh dalam mengimplementasikan kurikulum. Tujuan harus dapat dirumuskan dengan jelas dan baik berkaitan dengan tujuan ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik.

Guru sebagai tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya diluar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antara individu, baik dengan administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha serta masyarakat sekitarnya, pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri. Dengan demikian, maka dalam pembaharuan pendidikan, keterlibat guru mulaidari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi suatu keberhasilan inovasi tenaga pendidik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Femonologi. Alasan penggunaannya karena memang saat ini merdeka belajar menjadi fenomena yang sangat tren dan menjadi Flatfrom yang dikedepankan oleh kementerian pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendafatkan sebuah informasi dan menganalisisnya lebih dalam untk memahami Implementasi kurikulum merdeka dalam pengembangan berfikir kritis pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Subjek penelitiannya adalah guru pendidikan Agama Islam dan siswa kelas 8 yang berjumlah 18 orang dan juga didukung oleh Kepala sekolah SMP Muhammadiyah 47 Sunggal Medan.

Jenis data yang dihimpun adalah data kualitatif terkait implementasi kurikulum merdeka belajar dalam pengembangan kemampuan berfikir kritis pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam teknik implementasi kurikulum merdeka belajar pada pembelajaran pendidikan agama islam. berbagai data tersebut bersumber dari data primer dan skunder.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Obsevasi dilakukan dengan mengamati pembelajaran yang digunakan guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, Wawancara dilakukan untuk mendapatkan ata implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan kurikulum merdeka belajar sedang dirintis oleh para pelaksana pendidikan. Kurikulum merdeka belajar merupakan amanat dari menteri Nadiem Makarim yang menginginkan pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan memiliki kemerdekaan (Faiz & Kurniawaty, 2020)(Faiz, Pratama, et al., 2022). Nadiem Makarim juga

menuturkan bahwa dalam mendorong transformasi pendidikan diperlukan kemampuan yang holistik diperlukan perubahan kurikulum (Kholisdinuka, 2020)(Faiz, Parhan, et al., 2022).Proses Penerapan kurikulum merdeka belajar tidak serta merta berjalan mulus. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang tidak sesuai keinginan, apalagi mengingat kurikulum tersebut masiah pada tahap penerapan awal. Faktor-faktor pendukung dalam Supervisi Klinis dalam Penerapan kurikulum merdeka belajar di SMP Muhammadiyah 47 Sunggal Medan Terkait faktor pendukung dalam Penerapan kurikulum merdeka belajar, bahwa ada faktor internal dan eksternal adapun sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor internal yang muncul saat dilakukan supervisi adalah adanya nilai multikultural yang beragam sehingga guru perlu memiliki nilai toleransi yang tinggi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Suropto,S.Pd. bahwa penanaman nilai beragama didukung dengan fasilitas yang memadai dengan memfasilitasi gurukelas yang ada di sekolah. Selain itu dengan adanya guru di sekolah ini menjadikan lebih mudah dalam Penerapan kurikulum merdeka belajar

2. Faktor eksternal

Terkait faktor eksternal mengenai perlunya penanaman nilai multikultural, sebagaimana yang mengungkapkan oleh Ibu Dasih, bahwa faktor eksternal yang ditemukan adalah peran keluarga. Adanya pengawasan orang tua ketika peserta didik itu dirumah dan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang baik itu juga akan membuat anak ini menjadi anak yang baik juga

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan SMP Muhammadiyah 47 Sunggal Medan memiliki beragam peserta didik, baik itu agama, budaya, ras dan sosial, meskipun memiliki peserta didik dan guru yang beragam mereka saling menghargai perbedaan tersebut dengan dasar bagiku agamaku bagimu agamamu. Sehingga dalam proses pembelajaran berjalan mengutamakan nilai toleransi dan multikulturalisme. Untuk mewujudkan sekolah yang dapat mengimplementasikan supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka belajar dibutuhkan strategi dari seorang guru berpendidikan yang bergerak sebagai fasilitator dalam pengajaran, membimbing dan membina menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, pendidik merupakan faktor penting dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar, apabila seorang guru memiliki paradigma pemahaman keberagaman yang moderat maka dia juga akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka belajar tersebut terhadap peserta didik.

Penanaman nilai multikultural melalui pembelajaran di SMP Muhammadiyah 47 Sunggal Medan sebagaimana menurut Athur,bahwa strategi pembelajaran merupakan pola kegiatan pembelajaran berurutan yang diterapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan untuk mencapai suatu hasil belajar peserta didik yang diinginkan. Dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan (Trianto, 2011).

Pelaksanaan supervisi klinis yang dilakukan di SMP Muhammadiyah47 Sunggal menggunakan strategi ekspositori,sebagaimana menurut Sanjaya (2007: Siregar, 2018) , bahwa implementasi supervisi klinis dalam penerapan kurikulum merdeka belajar dapat dilakukan dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

1. Strategi ekspositori

Strategi ekspositori yang ditemukan dalam supervisi adalah bagaimana guru menjadi pemegang pembelajaran dengan strategi yang tepat agar peserta didik dapat menguasai mater pembelajaran. Guru yang memahami strategi yang baik maka akan terlihat enjoy saat dilakukan supervisi oleh pengawas.

2. Strategi berbasis masalah

Strategi berbasis masalah mengutamakan proses belajar, guru memfokuskan diri untuk membantu peserta didik dalam penyelesaian masalah. Penggunaan strategi ini membutuhkan pemikiran yang mendalam.

Komendikbud risek Nadiem Anwar Makarin Resmi meluncurkan nama baru kurikulum prototipe yang diberi nama kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih luwes serta berpusat pada materi mendasar serta mengembangkan keunikan dan kemampuan siswa.

Adapun tujuan belajar mandiri ialah supaya pendidik, peserta didik dan orang tua mengalami suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Kebebasan belajar berarti pengembangan pendidikan harus harus memunculkan suasana yang menyenangkan bahagia untuk pendidikan, bagian untuk peserta didik, bahagia untuk orang tua peserta didik dan bahagia kepada seluruh orang. Pembelajaran mandiri “ merdeka belajar” adalah bentuk pengembangan strategi pemerintah yang mengembalikan sifat penilaian yang semakin terabaikan. Konsep pembelajaran mandiri adalah bentuk penyesuaian kebijakan yang mengembalikan sistem pendidikan nasional pada hakekat undang-undang agar sekolah mandiri dalam memaknai kompetensi inti kurikulum dalam proses penilaiannya.

Sistem pengajaran juga akan bergeser dari nuansa di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan belajar akan lebih santai, karena siswa dapat lebih banyak berdiskusi dengan pendidik, belajar dengan jalan-jalan, tidak hanya mendengarkan penjelasan pendidik, tetapi juga membentuk karakter siswa yang pemberani, mandiri, bersosialisasi, beradab, santun, kompeten, dan tidak semata-mata didasarkan pada sistem penilaian yang menurut beberapa jajak pendapat hanya mengkhawatirkan anak-anak dan orang tua, karena sebenarnya setiap peserta didik mempunyai kemampuan dan kepintaran dalam keahlian anak tersendiri. Kedepannya akan terbentuk peserta didik yang mau bekerja dan memiliki keterampilan serta kualitas yang baik di masyarakat. Berikut ini beberapa rancangan pembaharuan dalam kurikulum merdeka belajar. (Evi Hasim, 2020).

- a. Ujian Nasional (UN) akan diganti dengan Penilaian Keterampilan Minimum dan Survei Kepribadian. Ulasan ini berfokus pada keterampilan penalaran alfanumerik berdasarkan praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan yang ujian nasionalnya dilaksanakan pada akhir tahun ajaran, penilaian ini akan diambil di kelas , empat, delapan dan sepelas. Hasilnya, sekolah membutuhkan entri untuk meningkatkan kemajuannya, sebelum siswa menyelesaikan program studi.
- b. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan di pegang langsung oleh sekolah, Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah memiliki pilihan untuk menentukan formulir penilaian, seperti portofolio, tulisan, atau pekerjaan rumah.
- c. Merampingkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). dikutip dari Nadiem Makarim, RPP hanya cukup untuk membuat satu halaman. Dengan penyederhanaan administrasi diharapkan waktu guru yang dihabiskan dalam administrasi dapat dikonversi dari menjadi kegiatan belajar dan meningkatkan keterampilan.
- d. Dengan penerimaan siswa baru (PPDB), sistem pemekaran baru (PPDB), sistem pemekaran diperluas menjadi (tidak termasuk zona 3T). Bagi siswa yang mengikuti Afirmasi dan Jalur Sukses, mereka memiliki lebih banyak

peluang daripada sistem PPDB Pemerintah daerah diberikan kewenangan teknis untuk menetapkan wilayah zonasi ini. (Evi Hasim, 2020).

Maka jika dilihat pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum untuk menciptakan kurikulum yang luas, komprehensif, dan spesifik. Tahapan ini terkait dengan pengorganisasian pemilihan komponen yang berbeda dari proses pembelajaran, termasuk menetapkan jadwal untuk mengatur kurikulum, menentukan pada tujuan yang diusulkan, mata pelajaran, aktivitas, sumber daya, dan langkah-langkah. alat pembangunan program yang berkaitan dengan penciptaan sumber daya unit, rencana unit, dan aliran lain dari kursus bergantian untuk tujuan memfasilitasi proses belajar mengajar. Pengembangan kurikulum adalah tahapan perencanaan dan penyusunan kurikulum yang bertujuan untuk membuat rencana kurikulum yang lebih baik dan menyesuaikannya dengan kondisi yang telah ada. Program ini dibangun karena berkaitan erat dengan keadaan dan kondisi, sehingga program ini membutuhkan inovasi dan pengembangan yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh lingkungan (Hidayat et al., 2019).

Pengembangan kurikulum tidak hanya berfokus kepada guru sebagai pendidik, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang berkepentingan. Dengan begitu, rencana yang diterapkan akan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya dan pada akhirnya, akan menghasilkan pencapaian dan hasil yang diinginkan bagi siswa. Kurikulum tidak akan tercapai jika dibiarkan begitu saja setelah dikembangkan. Program yang dirancang secara optimal harus dilaksanakan dan memiliki hasil belajar. Banyak kurikulum yang telah dirancang dan dikembangkan tidak dilaksanakan karena kurangnya perubahan terencana di seluruh sistem sekolah. Kegagalan dalam kurikulum dapat dikaitkan dengan alasan yang belum serius mempertimbangkan pengembangan kurikulum. Biasanya, individu di Sekolah percaya bahwa upaya kurikulum adalah untuk melengkapi rencana baru yang telah dikembangkan atau materi baru yang dibeli. Lebih peduli dengan masalah manajemen dan organisasi, daripada perubahan program. Banyak orang yang bertanggung jawab atas kurikulum tidak berurusan dengan pandangan makroskopik tentang perubahan atau menyadari bahwa inovasi memerlukan perencanaan yang cermat dan pengawasan yang ketat. Orang-orang ini sering berpikir bahwa implementasi menggunakan program baru atau tidak (Rouf et al., 2020).

Telah banyak perbaikan program di Indonesia yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia, perbaikan program itu sendiri dilakukan untuk menghasilkan cost atau outcome yang sangat efektif, mulai dari adanya kurikulum Belanda, Kurikulum Jepang, dan Pada tahun 1964 , sampai dengan pemberlakuan kurikulum merdeka belajar, sudah pasti terjadi perubahan kurikulum menurut Setiap tahun. memperbaiki dan menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan iptek yang ada pada masa sekarang. Dalam penerapannya, program "kurikulum" disini memiliki berbagai macam ide yang sangat bagus dan tepat, misalnya program KTSP 2006 ketika dilaksanakan, program ini lebih menitikberatkan pada pendidik, dimana pendidik disini bisa dan bisa memunculkan ide-ide yang menarik dan relevan. Ide-ide baru yang menarik dan cara belajar yang baru, sehingga partisipasi peserta didik dalam kegiatan kecil, sehingga disini tidak menunjukkan kepribadian masing-masing peserta didik, tidak mengerti apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan peserta didik (Andriani, 2013). Adapun perbaikan kurikulum yang akan dilakukan lagi yang masih terus digarap, khususnya kurikulum sekarang. Faktor-faktor tertentu yang dianggap mendorong perubahan agenda kurikulum, yaitu liberalisasi faktor-faktor tertentu dianggap mendorong perubahan agenda, yaitu pembebasan wilayah-wilayah tertentu di dunia, dunia dari penjajahan, pesatnya perkembangan iptek dan dunia. penduduk meningkat sangat pesat. Efektivitas inovasi kurikulum memiliki banyak alasan, dengan perubahan kurikulum diharapkan dengan tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri, faktor pertama penyebab perubahan kurikulum, yang dapat berubah karena sistem pemerintahan berubah, misalnya. ganti

presiden baru, juga harus ada reformasi di mana semua aspek sistem sosial, politik, ekonomi, ideologi dan pendidikan juga bisa diubah.

Konsep Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Kabinet Indonesia maju mencanangkan program “Merdeka Belajar”. “Merdeka Belajar” diretas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Banyak hal yang melatarbelakangi pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar”. Salah satunya adalah memberikan kebebasan berpikir, yang harus dimulai oleh para guru sebelum mengajar (dari sudut pelaksanaan yang riil dan sederhana). Nadiem Anwar Makarim menyebutkan dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Sejalan dengan uraian di atas alasan lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” merupakan sekelumit dari kondisi pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Adapun yang melatarbelakanginya secara umum lahirnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam upaya mencapai kemajuan pendidikan di Indonesia adalah mencapai pendidikan yang ideal dan maju. Pendidikan merupakan media dan salah satu syarat dalam meraih tercapainya kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam hal ini warga negara Indonesia yang hendak maju dan berkembang mesti ada semangat untuk memajukan pendidikan (Pulungan & Asfiati, 2019).

Analisis terhadap Kurikulum Merdeka

Jadi konsep “merdeka belajar” merupakan kebijakan baru untuk memperbaiki model pendidikan Nasional. Pendidikan yang mengalami dinamika. Pendidikan yang berani melakukan perubahan. Perubahan dari berbagai sisi pendidikan. Sisi Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) diganti ujian (asesmen). Ujian Nasional (UN) diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirampingkan. Dengan harapan dapat menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Keempat pemikiran di atas akan dianalisis guna memahami hakikat pentingnya kebijakan “Merdeka Belajar” dalam memperbaiki dan memajukan Pendidikan Nasional.

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Ujian Nasional sebelum dicanangkannya Konsep “Merdeka Belajar” dan sesudah “Merdeka Belajar” lahir. Kebijakan baru tentang “Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)”. akan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dalam menentukan bentuk penilaian. Bentuk penilaian berbentuk karya tulis ilmiah, portofolio (kumpulan produk belajar yang diberikan oleh guru selama 1 semester) atau bentuk penugasan lainnya. Pendidik dan peserta didik dalam mengeksplorasi materi belajar memiliki kebebasan berkegiatan.

Ujian Nasional

Konsep “Merdeka Belajar” diharapkan dapat menerjang perbaikan dalam dunia pendidikan. “Merdeka Belajar” dirancang guna adanya keseragaman dalam menentukan arah dari pendidikan. Pendidikan sangat diharapkan kontribusinya dalam memajukan pendidikan. Kontribusinya dapat melalui Ujian Nasional (UN). Di mana Ujian Nasional (UN) ini dapat dijadikan pijakan dalam memenuhi kebutuhan bangsa. Peserta didik dapat diukur melalui kemampuan ilmu dan pengetahuannya melalui ujian. Salah satunya Ujian Nasional (UN). Karena

pada hakikatnya outcome atau output pendidikan adalah ke dunia masyarakat. Dalam kajian sejarah sangatlah berupaya memfokuskan setiap kajian pendidikan untuk kemajuan bangsa. Kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, melalui kemampuan ilmu dan pengetahuan yang terukur sesuai dengan kebutuhan dunia masyarakat. Ujian Nasional (UN) formatnya menjadi asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum di mana guru bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum (Manalu, 2020)

Pelaksanaan asesmen kompetensi membuat guru harus lebih kreatif dalam menentukan bahan penilaian. Asesmen kompetensi memengaruhi kebiasaan guru yang mengacu pada silabus tanpa adanya improvisasi model pembelajaran dan berlaku konservatif pada model pembelajaran yang konvensional. Kebijakan “Merdeka Belajar” menunjukkan bahwa guru dituntut untuk kreatif mengembangkan penilaian bagi peserta didik. Dalam rangka menyikapi harapan kebijakan “Merdeka Belajar” bahwa Ujian Nasional (UN) mencapai kompetensi penalaran maka banyak hal yang harus diberikan kepada peserta didik dalam content pembelajaran. Content pembelajaran yang mengukur kompetensi minimum dan survei peserta didik, maka pada peserta didik penting diberikan karakter literasi. Hal ini merupakan tuntutan dalam mengembangkan dan menjadi penguat karakter anak bangsa dan dalam rangka menyahuti abad ke-21 di mana setiap negara sudah layak menguasai keterampilan literasi (Asfiati, 2017). Keterampilan tersebut meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Kebijakan “Merdeka Belajar” yang ketiga adalah tentang persiapan mengajar. Persiapan mengajar termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan sebuah dokumen yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menetapkan tujuan pembelajaran secara terukur dan telah memikirkan sejumlah kegiatan belajar mengajar untuk mencapainya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) rancangan skenario pembelajaran yang dibuatnya secara efektif. “Merdeka Belajar” menyederhanakan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam tiga komponen yaitu: tujuan, skenario, dan penilaian.

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tawaran “Merdeka Belajar” adalah agar guru tidak kaku dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang saat situasi sekarang ini menuntut agar guru menyelesaikan pembelajaran dalam waktu 2 x 35 menit untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), 2 x 40 menit untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 2 x 45 menit jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan materi yang padat. Kebijakan “Merdeka Belajar” memerdekakan guru. Konsep “Merdeka Belajar” menetapkan tujuan pembelajarannya sesuai konteks peserta didik yang dihadapinya. Guru berbeda dapat merumuskan tujuan berbeda bahkan guru yang sama dapat merumuskan tujuan berbeda untuk kelas yang berbeda. Target pembelajaran dapat dinaikkan dan diturunkan sesuai konteks riil siswa. Guru dapat secara merdeka menentukan skenario pembelajaran lebih efektif. Guru dengan sendirinya mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Program Pengajaran (RPP). Guru mengukur keberhasilan pembelajaran melalui Rencana Program Pengajaran (RPP).

Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran PAI

Pendidikan Agama Islam sebagai nama mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi mestilah dirancang sesuai dengan harapan dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan Agama Islam dapat diajarkan dengan saksama guna mencapai tujuan yang sesuai dengan konsep sejarah dan masa depan bangsa. Tujuan yang

hendak dicapai adalah tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan rencana dan aktivitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus jelas dan mengikuti setiap era dan perkembangan. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam versi “Merdeka Belajar” mesti memperhatikan hal-hal berikut: a) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan beripikir kritis; b) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kreativitas; c) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi; d) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membuat peserta didik memiliki kerja sama dan mampu berkolaborasi; dan e) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam membangun jati diri peserta didik yang konfiden atau kepercayaan diri. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikatakan tercapai dan berhasil yaitu dengan mengukur tingkat kemampuan peserta didik yang mencapai tingkat kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan konfiden. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang membangun tingkat kritis menjadikan peserta didik lebih menfokuskan kepada materi ajar Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan sumber dan landasan serta kajian teori. Peserta didik yang memiliki kreativitas adalah peserta didik yang menghasilkan karya serta memiliki segudang inovasi untuk dijadikan sebuah tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Peserta didik yang memiliki komunikasi adalah yang terbiasa dengan aktivitas kemajuan dengan menyikapi keseluruhan teori-toeri keberagamaan. Peserta didik yang kolaboratif, di mana mampu diri dari semua aspek dan harapan pembelajaran yang indah dan menyenangkan. Tujuan terakhir adalah peserta didik yang konfiden memiliki kepercayaan diri penuh dan bertanggung jawab secara accountabilitas dan responsibilitas.

KESIMPULAN

Kurikulum merdeka banyak berakar pada penyesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan kondisi perubahan masyarakat yang beriring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama sistem informasi. Sebagai simpulan penulis mengutarakan diperlukannya langkah-langkah strategis dalam perubahan kurikulum nasional bagi pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni:

Pertama, peningkatan kualitas SDM merupakan keharusan bagi pendidik agama Islam dalam mengarungi era digital. Kualitas SDM akan berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan agama Islam, baik untuk kelembagaan maupun aspek lainnya. SDM dengan kemampuan, keahlian dan profesional yang mumpuni diharapkan dapat mengembangkan pendidikan agama Islam agar lebih optimal dengan segala sumber daya yang tersedia. Di era global dan digital, hanya negara-negara yang memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat bertahan. Keunggulan-keunggulan yang mutlak dimiliki adalah penguasaan sains-teknologi dan keunggulan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam hendaknya menekankan hal tersebut sebagai salah satu prioritas utamanya.

Kedua, pembenahan infrastruktur berbasis teknologi digital menjadi suatu keniscayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai respon terhadap globalisasi. Utamanya adalah infrastruktur berbasis teknologi digital. Hampir sebagian besar aktivitas pendidikan seperti administrasi manajemen, pembelajaran, dan lainnya, dapat memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Maka ketersediaan fasilitas infrastruktur yang mendukung menjadi jawaban dari tuntutan tersebut. Pada desain kurikulum PAI mesti memuat keharusan ketersediaan infrastruktur teknologi digital guna memudahkan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Kerap kali kendala dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan administrasi berkaitan dengan tidak atau kurang tersedianya infrastruktur. Inilah yang harusnya dibenahi agar kedepannya agama Islam

diperbincangkan lebih baik. Namun aspek pembiayaan menjadi problem bagi lembaga pendidikan Islam dalam menyiapkan infrastruktur berbasis problem bagi lembaga pendidikan Islam dalam menyiapkan infrastruktur berbasis teknologi digital. Butuh biaya yang tidak sedikit untuk memenuhinya. Karenanya, diperlukan strategi dan skema pembiayaan yang kompetitif. Pemerintah dan kalangan swasta dalam hal ini dapat diajak bekerjasama.

REFERENSI

https://scholar.google.com/scholar?cluster=9279106934396831000&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1690987907715&u=%23p%3DwnMSeEMd6YEJ

<https://jpion.org/index.php/jpi/article/view/15/10>

<https://www.neliti.com/publications/444639/analisis-implementasi-kurikulum-merdeka-di-sekolah-penggerak-sekolah-dasar>

https://scholar.google.com/scholar?q=related:xoYmAraSG-IJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1691020346037&u=%23p%3D_Zw2clbzbAkJ

<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/At-tajdid/article/view/20043/8357>